

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Upaya Paksa Terhadap Tersangka Terorisme dalam Perspektif Perlindungan Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka terorisme, dan bentuk bentuk perlindungan hukum pada saat upaya paksa dilakukan terhadap tersangka terorisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bertujuan untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin yang menjawab isu yang relevan dengan topik penelitian, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep sehingga sumber bahan hukum utama menggunakan peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum pendukung menggunakan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya paksa terhadap tersangka terorisme mengalami perbedaan dengan KUHAP, sehingga dalam aturan *lex specialis* upaya paksa terhadap tersangka terorisme yaitu, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan. Adapun perlindungan hukum ketika pelaksanaan upaya paksa dilakukan, terdapat gugatan praperadilan apabila terdapat kesalahan dalam melakukan penerapan upaya paksa. Terkait hak-hak yang tidak diberikan atau dilanggar dapat ditindak berdasar dengan ancaman kepada penyidik, yang tidak menerapkan upaya paksa penangkapan dan penahanan dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 25, Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya paksa yang dilaksanakan sangat kompleks untuk tersangka teroris dan perlindungan hukum telah mengakomodir semua hak subjek hukum, namun ketika terdapat tidak sahnya upaya paksa yang diberikan kepada tersangka teroris, hanya dapat dilindungi melalui mekanisme praperadilan saja.

Kata Kunci : Tersangka, Upaya Paksa, Perlindungan hukum

ABSTRACT

This thesis is concerning Coercive Action against Terrorism Suspects from a Legal Protection Perspective. This study is normative legal research that analyzes the concept of coercive action against terrorism suspect by law enforcers with statute and conceptual approach. In statute approach, legislations on criminal procedure and law of combating Terrorism Criminal Act are provided to address this issue. While conceptual approach encompasses legal principles and doctrines which also used to examine this issue. This thesis presents that coercive action against terrorism suspects in Terrorism Criminal Act is not similar to the Criminal Procedure Code. Terrorism Criminal Act defines coercive actions as arrest, detention, search, examination of document, foreclosure and wiretap. In addition, there is pretrial lawsuit against law enforcers when the illegality of arrest and detention occurred. According to Article 25 and 28 on Terrorism Criminal Act, law enforcer who does not implement the arrest and detention in accordance to the procedure is subject to criminal sanction. Those articles create a legal protection for the person who is being accused as terrorism suspect. In conclusion, coercive action has implemented in complex way to terrorist suspect however the legal protection also provided through pretrial institution when the official has conducted arbitrary coercive action which violates the basic of human rights.

Keywords: Suspect, Forced Efforts, Legal Protection